

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu modal utama bagi manusia guna memperbaiki kualitas hidupnya. Proses pendidikan bisa dilakukan oleh manusia baik melalui instansi formal maupun non-formal, hal ini berkaitan dengan makna pendidikan yang sangat luas. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pendidikan yang dilakukan oleh instansi formal yang diselenggarakan oleh lembaga sekolah. Sekolah dianggap sebagai salah satu jalan utama menuju kesuksesan. Paradigma ini muncul sebagai akibat adanya syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak biasanya membutuhkan ijazah, sehingga penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dituntut untuk memiliki kualitas yang baik untuk memenuhi prasyarat tersebut.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia telah berlangsung sejak masa kerajaan-kerajaan, bahkan jauh melebihi itu. Sistem pendidikan awal yang diperkenalkan di Indonesia terutama sistem pendidikan Islam yang dilakukan masih secara tradisional dan belum tersusun kurikulum baku seperti sekarang ini (Syahminan, 2014: 236) dan juga pendidikan yang dilakukan masih belum menggunakan sistem klasikal melainkan dilakukan di dalam surau maupun pesantren. Pendidikan formal baru diperkenalkan di Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat di Indonesia, pendidikan yang dibawa oleh pengaruh Barat merupakan pendidikan klasikal yang berorientasi pada intelektualitas, rasionalitas, dan kebutuhan akan pencapaian tujuan sekuler lainnya dengan sistem yang telah

tersusun secara rapi (Nasution, 2011: 9-10). Kelemahan pendidikan pada masa tersebut adalah akses pendidikan untuk masyarakat secara umum masih sangat minim, pendidikan yang dikelola oleh bangsa Barat hanya diperuntukan bagi sebagian golongan saja, terutama guna memenuhi kebutuhan pendidikan bagi bangsa mereka dan keturunannya, meskipun akses diberikan kepada masyarakat Indonesia hal tersebut hanya dibatasi bagi kaum elite semata.

Semenjak Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia, Negara harus bisa memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk bisa mengakses pendidikan secara merata tanpa terkecuali. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak selamanya berjalan mulus, terdapat beberapa permasalahan seperti yang dikemukakan Mussyadad (2013: 52-55) diantaranya: 1) orientasi kurikulum masih berpusat pada ketuntasan materi pelajaran; 2) biaya pendidikan di Indonesia masih tergolong mahal; 3) tujuan pendidikan yang melenceng, kualitas pendidikan hanya diukur dengan ijazah; 4) pelaksanaan ujian nasional, pendidikan seakan hanya berorientasi pada aspek kognitif; 5) kesenjangan fasilitas pendidikan antar sekolah, dimana pendidikan yang berada di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan terdapat kesenjangan yang sangat besar, yang mengakibatkan tidak adanya kesetaraan dalam pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan warganya agar memiliki daya saing di dunia global dilakukan dengan berbagai cara, salah satu langkah yang diambil adalah melakukan pembaharuan terhadap kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia

global akan lulusan persekolahan. Kurikulum merupakan pusat dari sebuah pendidikan, hal ini berangkat dari komponen-komponen yang ada dalam kurikulum itu sendiri. Seperti kita ketahui dalam kurikulum memuat tujuan pendidikan nasional yang menjadi landasan pokok pendidikan nasional. Selain itu muatan materi (isi pembelajaran), strategi, metode, media, dan evaluasi yang menjadi motor proses pembelajaran merupakan komponen utama sebuah kurikulum. Dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan sebuah proses belajar mengajar (proses pendidikan) sangat dipengaruhi oleh kualitas kurikulum yang digunakan pada instansi pendidikan. Namun demikian dengan adanya pendidikan pada masa globalisasi menyebabkan manusia lebih bersifat individualis, mereka asik dan terpesona dengan penemuan baru dalam bidang iptek, sehingga cenderung melupakan kesejahteraan dirinya sendiri dan melupakan aspek sosialnya (Kumalasari, 2010 : 48)

Perubahan kurikulum yang dilakukan sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sebuah pendidikan, namun perubahan yang terus terjadi dan perubahan tersebut tidak melanjutkan tujuan pendidikan yang diusung oleh kurikulum sebelumnya membawa dampak negatif terhadap kualitas sebuah pendidikan. Masa berlaku kurikulum yang relatif singkat dengan masa perencanaan dan pengembangan yang minimal mengakibatkan muncul ketidaksiapan lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Bisa diambil contoh Implementasi Kurikulum 2013 sejak awal rancangannya mendapat berbagai kritikan karena dianggap kurang persiapan, dimulai dari Kementerian Pendidikan yang dianggap kurang siap, sampai pada

lembaga penyelenggara pendidikan, bahkan kesiapan bahan ajar ketika kurikulum tersebut diimplementasikan tetap mendapat kritikan karena terlambatnya proses distribusi. Pendidikan Indonesia menghadapi masalah yang tidak sederhana karena pelaksanaan kurikulum 2013 dianggap terlalu terburu-buru, tanpa melalui evaluasi secara menyeluruh (Istiqomah, 2016: 45).

Kurikulum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama kurikulum yang mengakomodir semua mata pelajaran dan yang kedua adalah kurikulum yang lebih berfokus pada salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah. Kurikulum Sejarah merupakan salah satu kurikulum mata pelajaran di Sekolah Menengah Atas. Kurikulum mata pelajaran sejarah Indonesia memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Keadaan ini muncul dikarenakan konten yang dipelajari dalam mata pelajaran sejarah, terutama sejarah Indonesia berkaitan dengan perjuangan hidup masyarakat Indonesia pada masa lampau, yang diharapkan bisa membangkitkan rasa nasionalisme masyarakatnya.

Pengelolaan pendidikan memang dilaksanakan oleh berbagai elemen mulai dari pemerintah pusat, daerah, maupun instansi pendidikan, namun pada dasarnya standarisasi pengelolaan pendidikan datang dari pemerintah pusat, dimana negara mengatur tata laksana pendidikan melalui perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah yang dikeluarkan mengenai pendidikan. Kekuasaan pemerintah untuk membuat peraturan dalam bidang pendidikan menjadikan pemerintah memberikan pengaruh yang sangat besar di dalamnya, seperti

penggunaan pendidikan untuk menjaga status quo sebuah rezim yang berkuasa (Nasution, E, (tt)) elemen yang paling sering digunakan sebagai alat ini adalah buku teks pelajaran yang dipakai, karena muatan politis dengan tujuan legitimasi memang paling mudah dan efektif apabila dimasukkan dalam buku teks/pelajaran di sekolah.

Implementasi kurikulum yang tergesa-gesa akan sangat berpengaruh terhadap pengadaan buku teks pelajaran, kualitas buku teks akan kurang optimal karena waktu untuk penyusunannya yang relatif singkat. Sebagai contoh terbaru pengadaan buku teks K-13 dianggap rawan korupsi, karena sistem pengadaan buku yang masih belum beres. Selain itu menurut Totok Amien Soefijanto (Obaedillah, 2016: 1) konten dalam buku teks pelajaran K-13 masih belum ideal karena masih berisi seputar informasi sehingga kurang mendalam, dan seharusnya buku teks K-13 lebih mengutamakan konten sehingga membuat siswa lebih cepat memahami bidang studi yang diajarkan.

Mata pelajaran sejarah sebagai salah satu mata pelajaran yang mendapatkan hak istimewa dalam kurikulum 2013 sebagai salah satu mata pelajaran yang mendapatkan tugas untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Pembelajaran sejarah yang berkualitas membutuhkan bahan ajar/buku teks yang berkualitas pula. Meskipun mata pelajaran sejarah mendapatkan tugas untuk menanamkan karakter kepada peserta didik, tidak boleh lupa juga penyampaian materi/konten sejarah juga sangat penting. Salah satu materi yang terkandung dalam buku teks sejarah di SMA adalah sejarah peradaban Islam terutama peradaban di Indonesia.

Perkembangan sejarah bangsa Indonesia memiliki corak yang sangat menarik untuk dikaji, terutama menyangkut pola-pola peristiwa dalam setiap periodenya. Periodisasi dalam sejarah Indonesia memang sangat panjang karena pada dasarnya setiap periode sejarah bangsa Indonesia sangat kompleks. Sejarah Indonesia mulai dari zaman pra-aksara dibagi menjadi beberapa pembabakan, dan pada masa sejarah sendiri juga dibagi menjadi beberapa periode mulai dari peradaban Hindu-Budha dengan perkembangan kerajaannya yang sangat kompleks, sampai pada masuknya Islam ke wilayah Nusantara juga membawa karakteristik yang berbeda dengan masa sebelumnya, juga dengan berbagai macam kerajaan dan pengaruhnya pada perkembangan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia masa modern dimulai dari masa Kolonialisme-Imperialisme sampai pada masa kemerdekaan yang kesemuanya memiliki coraknya masing-masing.

Sejarah panjang kebudayaan Islam di Indonesia dimulai ketika ada hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan antara orang-orang Indonesia dengan pedagang asing yang beragama Islam baik itu pedagang dari Arab, Persia, India, Maupun Cina (Ghofur, 2011: 164). Hubungan perdagangan ini disebabkan karena letak geografis Indonesia sangat strategis sebagai jalur lalu lintas perdagangan pada masanya. Seperti diketahui Selat Malaka dan pelabuhan di Malaka merupakan jalur perdagangan utama, sekaligus tempat singgah para pedagang asing. Ketika persinggahan inilah terjadi penyebaran agama yang dilakukan oleh para pendatang tersebut, ada beberapa hal yang sangat unik dalam penyebaran agama Islam di Indonesia dimana Islam tidak diajarkan sebagaimana penyebaran di negara asalnya. Penyebaran Agama Islam di Indoneia dilakukan

melalui akulturasi budaya antara budaya Islam dan budaya lokal, dengan adanya keadaan inilah penyebaran Islam sangat cepat di bumi Nusantara.

Perkembangan peradaban Islam dimulai dengan pembentukan komunitas-komunitas muslim kecil di wilayah pesisir (Yatim, 2008: 196), penyebaran awal Agama Islam dilakukan lewat berbagai jalur seperti; perdagangan, pernikahan, pendidikan, dakwah, dan kebudayaan (Syafriзал, 2015: 241-242; Yatim, 2008: 200-204). Ciri khusus penyebaran agama Islam di Indonesia adalah cara yang diambil dalam penyebaran Agama ini sepenuhnya lewat jalur damai sehingga masyarakat lokal Indonesia sangat tertarik untuk menganutnya, dan penyebarannya pun relatif lebih cepat. Sistem kasta yang sebelumnya dipakai pada masa Hindu-Budha tidak ditemukan dalam Islam, kesetaraan manusia menjadi daya tarik yang mampu menarik minat masyarakat untuk masuk dalam agama Islam.

Perkembangan selanjutnya, ketika wilayah pemukiman muslim mulai meluas, muncul kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Kerajaan pertama yang berdiri berada di wilayah Sumatera karena penyebaran awal agama Islam memang di wilayah tersebut, yang pada masanya menjadi jalur perdagangan utama dan dijadikan tempat persinggahan para pedagang muslim. Beberapa kerajaan yang ada di wilayah Sumatera seperti Samudra Pasai, Perlak, Malaka, dan Aceh merupakan beberapa kerajaan Islam yang cukup kuat. Sementara pada perkembangan selanjutnya, di wilayah Jawa juga mulai berdiri kerajaan Islam, wilayah ini memiliki ciri yang khas bila dibandingkan dengan kerajaan Islam di wilayah lainnya. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah kerajaan Demak, pelopor

utama pendirian kerajaan ini adalah para Wali Songo sehingga dalam pemerintahan Sultan di wilayah Jawa menempatkan para wali/pemuka agama Islam sebagai penasehat dalam kerajaan. Perkembangan kerajaan Islam yang terakhir muncul di wilayah timur Indonesia beberapa diantaranya adalah Kerajaan Makasar, Tidore dan Ternate yang berkembang beriringan dengan masuknya bangsa Barat ke wilayah Nusantara.

Seperti diketahui bersama, perjalanan sejarah bangsa Indonesia memang sangat panjang, sehingga muncul masalah dalam proses pemilihan materi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Adanya fakta bahwa sejarah Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas, sementara jam pelajaran di sekolah sangat terbatas berakibat banyaknya materi yang tidak bisa disampaikan seutuhnya kepada peserta didik. Permasalahan yang kemudian muncul adalah keterbatasan kemampuan kurikulum untuk memuat sejarah Indonesia secara utuh, materi yang disampaikan hanya sebatas materi-materi pokok ataupun kejadian-kejadian besar dan kurang memperhatikan kedalaman materi pada setiap kejadian sejarah tersebut.

Kemendikbud (2016: 4) dalam Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Mata Pelajaran Sejarah menjelaskan Pembelajaran sejarah dirancang untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan cara berfikir sejarah, menumbuhkan kembangkan nilai-nilai kebangsaan, mengembangkan inspirasi, dan mengaitkan peristiwa lokal, nasional dengan peristiwa global dalam satu rangkaian sejarah. Mata pelajaran sejarah memiliki tujuan antara lain: (1) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman

mengenai kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta dunia melalui pengalaman sejarah bangsa Indonesia dan bangsa lain; (2) mengembangkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan penghargaan kritis terhadap hasil dan prestasi bangsa Indonesia dan umat manusia di masa lalu; (3) membangun kesadaran tentang konsep waktu dan ruang dalam berpikir kesejarahan (*historical awareness*); (4) mengembangkan kemampuan berpikir sejarah (*historical thinking*), keterampilan sejarah (*historical skills*), dan wawasan terhadap isu sejarah (*historical issues*), serta menerapkan kemampuan, keterampilan dan wawasan tersebut dalam kehidupan masa kini; (5) mengembangkan perilaku yang berorientasi pada nilai dan moral yang mencerminkan karakter diri, masyarakat, dan bangsa; (6) menanamkan sikap yang berorientasi kepada kehidupan masa kini dan masa depan berdasarkan pengalaman masa lampau; (7) memahami dan mampu menangani isu-isu kontroversial untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya; (8) mengembangkan pemahaman internasional dalam menelaah fenomena aktual dan global.

Proses pembelajaran pada tingkat sekolah menengah sangat bergantung pada ketersediaan buku teks (buku pelajaran) hal ini sangat berpengaruh terhadap penyusunan buku teks yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Kelemahan pembelajaran di Indonesia selama ini penyusunan buku teks terutama sejarah masih dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Mulyana, 2013: 86). Penyusunan buku teks untuk pembelajaran disekolah harus disesuaikan dengan kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah, hal ini yang mengakibatkan rawan masuknya muatan-muatan politis untuk kepentingan

pemerintah. Salah satu contoh yang paling nyata terlihat adalah bagaimana kekuatan militer pada masa Orde Baru dimasukan dalam buku teks sejarah, kajian pokok yang kentara adalah usaha yang dilakukan oleh militer masa pemerintahan Orde Baru untuk melawan pemberontakan-pemberontakan fisik. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Falk Pingel dalam pendahuluan bukunya *UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision* (Pingel, 2010: 8).

...Textbook authors have not always been critical enough towards the society they live in. With the emergence of nation states in the last century it became quite obvious that schoolbooks contain statements that glorify their own nation and disparage others, that glorify the ruling groups within one nation or society and disparage so-called minority groups. During this time concerned educationalists and politicians had already noticed that textbooks, especially history textbooks, didn't and don't only convey facts but also spread ideologies, follow political trends and try to justify them by imbuing them with historical legitimacy.

Terjemahan bebas dari pernyataan tersebut kurang lebih bahwasanya pengarang buku teks tidak terlalu kritis mengenai isu-isu terhadap masyarakat tempat mereka tinggal. Dengan munculnya negara bangsa pada abad terakhir, buku teks yang ditulis berorientasi pada pernyataan-pernyataan yang memuliakan bangsa mereka sendiri dan meremehkan yang lainnya, juga mengagungkan kelompok-kelompok penguasa dalam sebuah negara atau masyarakat dan meremehkan kelompok minoritas. Selama masa ini para ahli pendidikan dan politisi memperhatikan bahwa buku teks, terutama buku teks sejarah, tidak hanya menyampaikan fakta tetapi juga menyebarkan ideologi, mengikuti tren politik dan mencoba melakukan pembenaran dengan memasukannya kedalam legitimasi historis.

Di Indonesia pengandaan buku teks baik itu yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta harus melalui proses penilaian oleh pusat kurikulum dan perbukuan, secara logika dengan proses penilaian ini maka buku yang beredar dan dipergunakan oleh siswa dalam pembelajaran sudah baik. Namun demikian pada kenyataannya masih banyak buku yang secara konteks masih minim mendapatkan evaluasi, salah satu hal strategis yang terdapat di dalam buku teks adalah isi/materi. Isi buku teks harus bisa mewakili materi yang termuat di dalam kurikulum guna tercapainya tujuan pendidikan nasional, namun pada kenyataannya buku-buku yang selama ini beredar masih banyak yang tidak sesuai dengan kurikulum. Selain itu, buku-buku yang beredar terutama buku teks sejarah masih berpusat pada penyampaian fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah yang ada harus dipelajari dan dihapalkan oleh siswa, tapi masih minim memberikan pembelajaran dimana siswa mencari makna-makna yang tersimpan di dalam serangkaian fakta sejarah tersebut.

Materi/isi buku teks merupakan serangkaian fakta-fakta yang membentuk sebuah konsep/prinsip. Keberadaan fakta, konsep, definisi, prinsip merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh buku teks, hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman siswa dalam mempelajari sebuah fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kenyataan di atas memberikan ketertarikan kepada peneliti untuk melakukan analisis terhadap kualitas isi buku teks yang banyak dipergunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajarannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terus terjadinya perubahan kurikulum yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan.
2. Implementasi kurikulum kurikulum 2013 terkesan terlalu tergesa-gesa sebagai akibat dari minimnya waktu dalam tahap perencanaan dan pengembangan.
3. Pengadaan buku teks di Indonesia relatif singkat pada tahap penyusunan.
4. Proses distribusi buku teks kurang baik mengakibatkan rawan terjadinya korupsi.
5. Periodisasi sejarah Indonesia sangat luas, karena Indonesia memiliki sejarah yang panjang.
6. Periodisasi sejarah Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang mengakibatkan setiap materi sejarah setiap periodenya tidak bisa dikaji secara mendalam.
7. Subjektivitas penulis buku teks masih banyak ditemukan dalam penyusunan buku teks sejarah.
8. Buku teks sejarah dijadikan bahan legitimasi dan penguatan status quo pemerintah yang sedang berkuasa.
9. Sejarah peradaban Islam dalam buku teks memiliki jatah jam pelajaran yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan materi yang harus dipelajari.

C. Fokus dan Rumusan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan aspek lainnya maka penelitian ini hanya dibatasi pada muatan materi sejarah peradaban Islam yang termuat dalam buku teks sejarah untuk kelas X kurikulum 2013 mengenai materi sejarah peradaban Islam di Indonesia, buku yang digunakan dibatasi pada buku yang diterbitkan oleh kemendikbud dan Erlangga. Analisis yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap buku teks difokuskan pada permasalahan materi yang ada dalam buku tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

1. Bagaimana keseuaian materi yang termuat di dalam buku teks dengan materi yang termuat di dalam Kurikulum 2013?
2. Bagaimana keluasan materi sejarah peradaban Islam di dalam buku teks terbitan Kemendikbud dan Erlangga?
3. Bagaimana kedalaman materi Sejarah Peradaban Islam di dalam buku teks yang diterbitkan oleh Kemendikbud dan Erlangga?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis muatan materi sejarah peradaban Islam dalam buku teks mata pelajaran sejarah kelas X kurikulum 2013 di SMA.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dikasifikasikan menjadi dua manfaat yakni manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan akan menambah khasanah, konsep, teori dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian yang berkaitan dengan muatan sejarah peradaban Islam dalam kurikulum sejarah 2013 di SMA.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran tentang sejarah perkembangan peradaban Islam di Indonesia mulai dari teori masuknya peradaban Islam sampai pada Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.
- b. Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan tentang pentingnya muatan sejarah peradaban Islam dalam pembelajaran sejarah di SMA.